

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Partai Politik

2.1.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Surbakti, 2007:113).

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Bambang Sunggono, 2008:7).

Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikuti sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan

tersalurkan melalui partai politik. Pengertian partai. Menurut Sanit (2005:31) “Partai adalah Kelompok orang yang seases, sehaluan terutama di bidang politik”. Pendapat Subekti (2007:5) “partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai adalah suatu organisasi yang mempunyai visi dan misi membangun suatu pemerintahan dalam bidang politik.

Menurut pendapat Mas’oed (2011:7) “politik adalah kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses untuk menunjukan bersama negara dan melaksanakan tujuan itu”. Menurut Harichyono (2010:6) mengatakan bahwa “politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, atau negara, yang menyangkut proses menentukan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu”.

Budiarjo, (2008: 60), menyatakan bahwa partai politik adalah “suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama”. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Untuk menambah serta mempertegas pengertian di atas, di bawah ini disampaikan beberapa definisi mengenai partai politik, diantaranya:

- a. Carl J. Fredrich mengartikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi dengan stabil dengan tujuan merebut atau

- mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Budiarjo, 2008: 61).
- b. R.H. Soltou mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Budiarjo, 2008: 161).
 - c. Sigmund Neumann dalam karangannya *modern political parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Sanit, 2005: 162).

Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infra struktur politik, dimana partai politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstiusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Fatah, 2009:160).

Praktek kegiatan politik dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politik yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu. Lembaga-lembaga itu adalah: negara, lembaga-lembaga perwakilan rakyat, lembaga-lembaga peradilan, serta partai politik. Bagaimana praktek politik itu dilaksanakan tergantung pada sistem politik serta filosofi yang dinanut oleh masing-masing negara, mungkin demokratis dapat pula otoriter, theistik atau atheistik.

Partai politik merupakan sekumpulan orang-orang yang menjadi satu kesatuan maka terbentuklah organisasi politik yang mempunyai tujuan dan pemikiran yang sama. Partai politik bukan merupakan pekerjaan yang mudah, akan tetapi partai politik adalah pekerjaan yang sangat sulit. Anggota dari partai politik harus mempunyai ide-ide, nilai-nilai, cita-cita dan mempunyai tujuan yang sama. Partai politik mempunyai hubungan dengan masyarakat. Partai politik memilih beberapa anggotanya menjadi wakil masyarakat untuk mengatur pemerintahannya. Para anggota partai politik sebelumnya sudah tahu apa tugas dan fungsi yang akan mereka jalani nantinya.

2.1.2 Fungsi Partai Politik

Partai politik mempunyai fungsi-fungsi yaitu memilih kandidat-kandidat untuk membuat suatu bantuan. Fungsi partai politik dibentuk yaitu menjadi sumber pendidikan dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin tahu tentang apa itu politik.

Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik pasal 11 ayat 1, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui, mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, menurut Apter (2006: 163) Partai sebagai:

- a. Komunikasi Politik
Partai politik berfungsi sebagai komunikasi politik, artinya keberadaan partai politik di dalam kehidupan perpolitikan nasional berada pada posisi ditengah-tengah, panyalur aspirasi dari arus bawah (rakyat) dan penyalur informasi dari arus atas (penguasa)
- b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat yang berbeda
- c. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

Menurut Surbakti (2007:118) fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan Negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat.
- c. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Berdasarkan gambaran mengenai fungsi partai politik yaitu sebagai sarana untuk mencapai kepentingan orang-perorang, kelompok masyarakat dan kepentingan nasional suatu negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan, karena sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara.

2.2 Pengertian Pendidikan Politik

Pengertian Pendidikan Politik adalah Istilah ‘pendidikan politik’ merupakan istilah yang kerap digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan setiap proses yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi.

Meski demikian, dalam berbagai literatur jarang sekali ditemukan definisi yang baku mengenai istilah “pendidikan politik”. Jika istilah “pendidikan” didefinisikan sebagaimana uraian pada sub bab di atas, lalu “politik” didefinisikan sebagaimana Rauf (2004:8), “politik adalah

bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu, menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu”. Konsep-konsep pokok dalam politik adalah; negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.

Maka dapat ditarik definisi sederhana bahwa pendidikan politik merupakan suatu perangkat dengan mana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya memper-barui diri sendiri dan mempertahankan ideal-idealnya dalam menghadapi berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik dengan berbagai tujuannya. Sederhananya, adalah setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat untuk membebaskan manusia dari keterkungkungan kemiskinan sosial untuk kemudian memiliki kontribusi pada proses politik yang sedang terjadi, terutama pada persoalan yang menyangkut langsung dengan kepentingan hidupnya.

Pendidikan politik merupakan sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih (Rush dan Althof, 2005:45). Sedangkan menurut Mariana (2007:78) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah “belajar dan latihan

mensistematisasikan aktivitas sosial, dan membangun kebajikan-kebajikan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara”.

Tujuan pendidikan Politik Menurut Maran (2013:78) adalah:

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, kecil, anak didik, warga, masyarakat, rakyat):
- b. Mampu memahami situasi Sosial-politik penuh konflik.
- c. Berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai.
- d. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara.
- e. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

Dalam ranah teori politik klasik, Machiavelli menyatakan bahwa pendidikan politik perlu diberikan kepada orang-orang “yang belum tahu”. Pendidikan politik tersebut dimaknai bukan sebagai pendidikan politik yang negatif tentang pembenci tiran, melainkan pendidikan positif, yaitu diberikan pada orang-orang yang mengakui pentingnya pendidikan tersebut, sekalipun pendidikan tersebut merupakan alat tirani yang mengejar suatu keuntungan tertentu (Gramsci, 2001: 17).

Hungtinton (2004:54) menyatakan bahwa pendidikan merupakan “salah satu fungsi dari struktur politik di dalam masyarakat”. Dengan “menyamarkan” pendidikan politik dengan sosialisasi politik, Kantaprawira mendefinisikan pendidikan politik sebagai “upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat, dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik tersebut. Pendidikan politik tersebut dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1. Bahan-bahan yang dapat dibaca (readable, legible) seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang bisa membentuk pendapat umum,
2. Siaran yang dapat didengar (audible) dan televisi serta film yang dapat dilihat dan didengar (bersifat audio-visual),
3. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti masjid dan gereja yang menyampaikan khotbah, serta kemungkinan juga melalui pendidikan formil ataupun informil.

Almond dan Coleman, seperti dikutip oleh Gaffar (2006:56) menulis soal fungsi pendidikan politik dalam struktur politik, bahwa “yang ada dalam setiap sistem politik adalah metode-metode perekrutan dan latihan politik yang menyebabkan kita bertanya, bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan ke arah peranan-peranan dan orientasi-orientasi politik dalam sistem politik yang berbeda-beda? Atau fungsi perekrutan dan sosialisasi.”

Sementara itu, menurut Haryanto (2009:5), pendidikan politik adalah “setiap usaha untuk melahirkan kesadaran kritis bagi penghormatan atas hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, hak anak-anak, hak kultural dan politik kaum minoritas, hak-hak penyandang cacat, dan hak asasi manusia lainnya”. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat korelasi antara sikap penghormatan atas hak asasi manusia dan sistem politik yang demokratis. Pendidikan kritis akan mendorong lingkungan sistem politik yang demokratis yang akan melahirkan masyarakat yang menghargai HAM, namun masyarakat yang demokratis sulit diwujudkan oleh model pendidikan yang otoriter-totaliter yang merendahkan HAM. Oleh karena itu, membangun sistem sosial-politik yang demokratis hanya bisa diwujudkan oleh suatu sistem pendidikan politik kritis. Dengan kata lain, untuk mewujudkan sistem sosial-politik yang demokratis, diperlukan pendidikan politik yang kritis.

Sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik, jelas Almond dan Verba, dapat diukur dengan menggunakan ketiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Komponen kognitif misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai perkembangan sistem politik, para elite birokrasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik. Komponen afektif berbicara mengenai aspek perasaan seorang warga negara yang khas terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang membuatnya menerima atau menolak sistem politik

itu. Sedangkan dalam komponen evaluatif, orientasi warga negara ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dimilikinya. Dalam konteks keterkaitan pendidikan politik dengan budaya politik ini pula, pendapat yang berbeda ditulis oleh

Panggabean, yang menyatakan bahwa pendidikan politik ialah “cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi yang kemudian”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan budaya politik adalah “keseluruhan dari nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi dalam mana kegiatan politik terselenggara.

Naning, (2004: 1) menyatakan azas-azas yang melandasi dilaksanakannya pendidikan politik adalah;

1. Edukatif kultural, berupa pembinaan berdasarkan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat;
2. Demokratis dalam penyelenggaraannya;
3. Integralistik dengan program-program di bidang lain;

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa asas-asas pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arie Sunandar (2018)

Judul Fungsi Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Di Kota Tanjungpinang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu membuat Pendidikan politik menjadi elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif karena ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Partai Golongan Karya dalam melaksanakan Pendidikan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, sebab unsur-unsur yang terdapat di dalam pendidikan politik dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sosialisasi politik. Unsur-unsur itu mencakup nilai politik, pengetahuan politik dan sikap politik untuk masyarakat maka penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan pendidikan politik khususnya partai golongan karya kota tanjungpinang. Didalam Partai Politik khususnya Partai Golongan Karya mempunyai fungsi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan kader dengan tujuan dapat memberikan wawasan tentang politik sehingga masyarakat dan kader mampu dan dianggap bisa untuk berkarya di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Politik di

Partai Golkar Kota Tanjungpinang dapat dikatakan berhasil karna target karakterdes yang diharapkan telah melebihi kurang lebih 450 orang dari target awal 1300 menjadi 1750.

Penelitian tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat perbedaanya dan persamaannya. Perbedaan yaitu terdapat pada objek penelitian, dimana pada penelitian terdahulu objek penelitiannya di Kota Tanjungpinang, sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian persamaannya adalah sama-sama mengungkapkan masalah pendidikan politik, karena pendidikan politik terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan untuk memobilisasi massa dengan cara memberikan pendidikan tentang politik mengenai nilai-nilai dan norma-norma politik. dan sama-sama menggunakan teknik analisa data adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

2. Aris Tri Wibowo (2014)

Judul Fungsi Partai Politik Golkar Dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus di DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran partai politik golongan karya (Golkar) dalam pendidikan politik studi kasus DPD kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan setrategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam

penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber data, dan triangulasi metode atau teknik pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini bahwa peran partai Golkar dalam pendidikan politik di Kabupaten Sragen menunjukkan peran partai sangat penting dalam melakukan pendidikan politik. Untuk menarik simpati dari masyarakat partai Golkar Kabupaten Sragen melakukan kegiatan pendidikan politik dengan terjun langsung ke masyarakat melalui forum pertemuan warga dengan menyampaikan program partai dan visi misi partai juga menanamkan rasa nasionalisme, kebangsaan, kebinekaan, dan demokrasi begitu juga memberikan arahan cara berpolitik yang baik dan benar. Tujuan partai Golkar yang utama adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia mensejahterakan masyarakat. Partisipasi partai Golkar dalam pendidikan politik DPD partai Golkar kabupaten Sragen dengan cara mengadakan diklat kepada kader partai agar mampu memberikan penjelasan tentang politik ke masyarakat. Pencapaian yang diinginkan partai Golkar adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi dan menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, hukum dan HAM.

Penelitian tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat perbedaannya dan persamaannya. Perbedaan yaitu terdapat pada

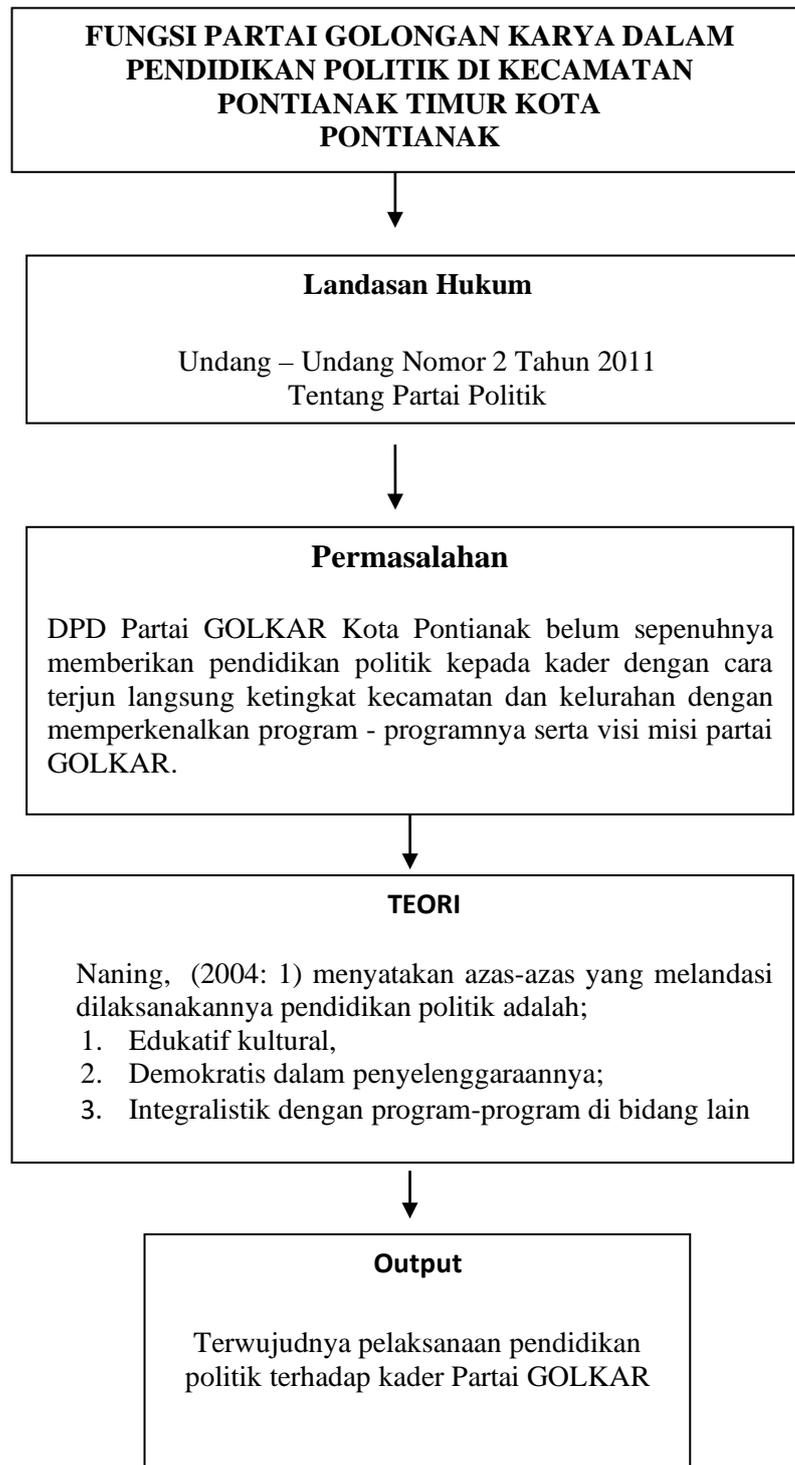
objek penelitian, dimana pada penelitian terdahulu objek penelitiannya di Kabupaten Sragen. sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian persamaannya adalah sama-sama mengungkapkan masalah Fungsi Partai GOLKAR Dalam Pendidikan Politik, karena sosialisasi politik partai GOLKAR mempunyai tujuan untuk memobilisasi massa dengan cara memberikan pendidikan tentang politik mengenai nilai-nilai dan norma-norma politik. dan sama-sama menggunakan teknik analisa data adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Merujuk kepada beberapa teori tentang fungsi Partai Golkar dalam pendidikan politik terhadap kader di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, maka penulis mencoba untuk membuat sebuah alur pikir penelitian, yang dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Alur Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana fungsi Partai GOLKAR dalam melakukan Edukatif kultural terhadap kader dan calon kader di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
2. Bagaimana fungsi Partai GOLKAR dalam melakukan Demokratis dalam penyelenggaraannya terhadap kader di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
3. Bagaimana fungsi Partai GOLKAR dalam melakukan Integralistik dengan program-program di bidang lain terhadap kader di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.